

## DAFTAR BACAAN

- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.*
- Subekti, Tjitrosudibio, R. 1986. *Kamus Hukum. Jakarta: PT. Pradya Paramitha:*
- Sudarto, K. S. H. P., & Pidana, H. (1986). *Alumni Bandung. Bandung.*
- Halim, A. R. (1986). *Tindak pidana pendidikan dalam asas-asas hukum pidana Indonesia: suatu tinjauan yuridis edukatif. Ghalia Indonesia.*
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.*
- Sjahriful, H. A. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Ghalia Indonesia*
- Tangun Susilo, I Wayan, dkk. 1993. *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasian di Kota Denpasar (Laporan Penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.*
- Soetoprawiro, K. (1994). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.*
- Nasional, B. P. H., & Kehakiman-RI, D. (1995). *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional. Jakarta: BPHN.*
- Arif, M., di Indonesia, K., & Pengantar, S. (1997). *Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman. Jakarta.*
- Hanitijo, Ronny. 1998. *Metode Penelitian dan Jurumetr. Jakarta: Ghalia..*
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Penerbit Universitas Indonesia.*
- Maris, M. (2005). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.*
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).*
- Tavipah, Y. B. (2007). *Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syiar Hukum, 9(3), 171–189.*

- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi : melalui hukum pidana nasional dan internasional / Andi Hamzah | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Raja Grafindo Persada.*  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=634988>
- Wina, K. (2010). *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang\* Romli Atmasasmita\*\*.* September 2013, 1–23.
- Situng, L. (2015). *Penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap.* *Lex Crimen*, 4(1)..
- Ibrahim, M. N. (2016). *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi.* *Katalogis*, 4(5).
- Hidayat, H. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.* *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 177830.
- Anshori, I. (2017). *Korupsi, terorisme, dan narkoba : upaya melawan kejahatan luar biasa yang sistematis / Dr. Imam Anshori Saleh, S.H.,M.Hum. | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Setara Press.*  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1059567>
- Wiyanto, R. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung. CV Mandar Maju*
- Arif, M. S. (2020). *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19.* *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40. [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Golonggom, M. N. (2021). *Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional.* *Lex Crimen*, 10(5).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.* *Sinar Grafika.*

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal I ayat 3 Tahun 2004

Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.